

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Ali, Muhamad (1993). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka Alumni.
- Amiruddin (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi (2011). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Basmanisar (2001). *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Baranf Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta : Penerbit Rajawali II Press.
- Chazawi, Adami (2014). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Evi, Hartanti (2007). *Tindak Pidana Korupsi (edisi II)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi kedua cetakan keempat*. Jakarta : Sinar grafika.
- Hamzah, Andi (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi (2005). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya(1993). *Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hiariej, Eddy OS (2002). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, M. Yahya (1998). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, jilid I*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*(2002). Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Lopa, Baharuddin (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan I*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

- Mertokusumo, Sudikno (2009). *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, cetakan keenam. Yogyakarta: Liberty.
- Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Cetakan II*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia
- Muhadjir, Noeng(1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi III)*. Yogyakarta : Rake Sararin.
- Poernomo, Bambang (1988). *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- P A F Lamintang dan Theo Lamintang (2010). *Pembahasan KUHAP:menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sartono dan Bhekti Suryani (2013). *Prinsip Prinsip Dasar Profesi Advokat* cetakan I. Jakarta : Dunia Cerdas.
- Shadily, Hassan , et., al., ed., (1983). *Ensiklopedia Indonesia* (Jilid 4). Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven Elsevier Publishing Projects.
- Simorangkir, J.C.T, dkk (2000). *Kuasa Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Nikolas (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Cetakan I*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono (2013). *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono(1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Rochmat (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung : PT. Eresco.
- Soeroso,R. (1993). *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sunaryo & Ajen Dianawati (2009). *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Visimedia.
- Tempo, Seri (2003). *Yap Thia Hien : 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, cetakan I*. Jakarta : Populer Gramedia.

Peraturan Perundang undangan

Indonesia. Undang Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan korupsi.

_____. Undang Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____. Undang Undang di No. 31 Tahun 1999 *junto* Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____. Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____. Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____. PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

_____. PMK No. 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia

Jurnal Ilmiah

Wahid, Hidayat Nur (2006). *"Bahaya Korupsi Bagi Perkembangan Bangsa"*. Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Vol. 4 No.2. Desember 2006, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional.

Nugroho, Hibnu (2013). *Efektifitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3 September 2013.

Santoso, Topo (2013). *"Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.3, September 2013, FH Unsoed.

Agus Raharjo dan Angkasa (2011). *Jurnal Dinamika hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011. FH Unsoed.

internet

Kusumasari, Diana, *Perbedaan antara Barang Bukti dengan Benda Sitaan*. Diakses dari : <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e53b67341c54/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan-> pada tanggal 21 Januari 2019, Jam 10.53 WIB.

Usfa, A. Fuad (2009). *Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana*. Diakses dari: <http://www.bawean.net/2009/05/peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya.html> pada tanggal 6 Desember 2018, Jam 13.05.

Diunduh dari :<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/arsip/berita/item/350-begini-alur-benda-sitaan-dari-diterima-kejaksaan-sampai-dilelang> diakses tanggal 9 september 2018 pukul 9.42

<http://www.kamusbesar.com/barang-sitaan> diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 10.53 WIB.

CV.Eka Wijaya. *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta:2002.Hlm.605 dan Hlm. 615 pada tanggal 6 Desember 2018, Jam 13.05.